

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep Pembangunan Manusia adalah manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indeks yang ditetapkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1996 untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai penghidupan yang layak. Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Sudah sepantasnya apabila manusia menjadi tujuan utama dalam pembangunan. Pentingnya pembangunan manusia menjadi suatu kebutuhan dalam pembangunan sebuah wilayah. Menurut UNDP pembangunan manusia dirumuskan sebagai upaya perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of the people*) dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (BPS, 2018).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja pemerintah.

Manfaat IPM menjadi sangat penting karena bernilai strategis dan dibutuhkan oleh banyak kalangan terutama pemerintah sebagai bahan rujukan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah adalah penentuan dana perimbangan daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), dimana salah satu alokatornya adalah IPM. Selain itu, IPM juga digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Kompetisi antarwilayah makin dinamis sebagai ajang adu kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan efisien. Namun pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak bisa dilihat dalam jangka pendek.

Indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya dapat diamati dari perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun. Perbandingan angka IPM satu provinsi dengan provinsi lainnya menentukan posisi relatif capaian IPM sekaligus mengukur relevansi pembangunan manusia di wilayah itu sendiri.



Tabel 1.1
IP M di 34 provinsi Indonesia dari Tahun 2014-2018

No.	Wilayah	IPM				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	ACEH	68.81	69.45	70.00	70.60	71.19
2	SUMATERA UTARA	68.87	69.51	70.00	70.57	71.18
3	SUMATERA BARAT	69.36	69.98	70.73	71.24	71.73
4	RIAU	70.33	70.84	71.20	71.79	72.44
5	JAMBI	68.24	68.89	69.62	69.99	70.65
6	SUMATERA SELATAN	66.75	67.46	68.24	68.86	69.39
7	BENGKULU	68.06	68.59	69.33	69.95	70.64
8	LAMPUNG	66.42	66.95	67.65	68.25	69.02
9	KEP. BANGKA BELITUNG	68.27	69.05	69.55	69.99	70.67
10	KEPULAUAN RIAU	73.40	73.75	73.99	74.45	74.84
11	DKI JAKARTA	78.39	78.99	79.60	80.06	80.47
12	JAWA BARAT	68.80	69.50	70.05	70.69	71.30
13	JAWA TENGAH	68.78	69.49	69.98	70.52	71.12
14	DI YOGYAKARTA	76.81	77.59	78.38	78.89	79.53
15	JAWA TIMUR	68.14	68.95	69.74	70.27	70.77
16	BANTEN	69.89	70.27	70.96	71.42	71.95
17	BALI	72.48	73.27	73.65	74.30	74.77
18	NUSA TENGGARA BARAT	64.31	65.19	65.81	66.58	67.30
19	NUSA TENGGARA TIMUR	62.26	62.67	63.13	63.73	64.39
20	KALIMANTAN BARAT	64.89	65.59	65.88	66.26	66.98
21	KALIMANTAN TENGAH	67.77	68.53	69.13	69.79	70.42
22	KALIMANTAN SELATAN	67.63	68.38	69.05	69.65	70.17
23	KALIMANTAN TIMUR	73.82	74.17	74.59	75.12	75.83
24	KALIMANTAN UTARA	68.64	68.76	69.20	69.84	70.56
25	SULAWESI UTARA	69.96	70.39	71.05	71.66	72.20
26	SULAWESI TENGAH	66.43	66.76	67.47	68.11	68.88
27	SULAWESI SELATAN	68.49	69.15	69.76	70.34	70.90
28	SULAWESI TENGGARA	68.07	68.75	69.31	69.86	70.61
29	GORONTALO	65.17	65.86	66.29	67.01	67.71
30	SULAWESI BARAT	62.24	62.96	63.60	64.30	65.10
31	MALUKU	66.74	67.05	67.60	68.19	68.87
32	MALUKU UTARA	65.18	65.91	66.63	67.20	67.76
33	PAPUA BARAT	61.28	61.73	62.21	62.99	63.74
34	PAPUA	56.75	57.25	58.05	59.09	60.06

Sumber: bps.go.id (data diolah)

Capaian angka Indeks Pembangunan Manusia setiap tahunnya adalah meningkat. Namun demikian, kemajuan pembangunan manusia antara satu provinsi dengan provinsi lainnya sangat bervariasi. Kemajuan ini sangat tergantung dari komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Kenaikan nilai IPM suatu daerah tentu sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan internal masing-masing daerah salah satunya adalah kebijakan dalam hal keuangan yang mendukung pembangunan masyarakat di tiap-tiap provinsi tersebut.

Pemerintah saat ini tampaknya sangat memperhatikan pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu alokator dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan daerah (fiscal gap). Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan indeks kemahalan konstruksi. Seyogianya, daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Meski demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan termasuk strategi dalam pengelolaan keuangan.

Berbicara mengenai pembangunan kesejahteraan masyarakat, maka tidak terlepas dari kebijakan daerah dalam membangun daerahnya sendiri. Otonomi daerah membuat pemerintah daerah diberi mandat untuk menjalankan tugas-tugas demi kemajuan wilayahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimuat tugas Pemerintah Daerah salah satu diantaranya Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat tergantung komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diharapkan mampu membantu pemerintah pusat dalam menjalankan tugasnya dengan baik termasuk dalam pengelolaan keuangan agar daerah lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahannya. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah.

Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Sebagaimana daerah-daerah di Indonesia masalah utama yang dihadapi daerah otonom adalah rendahnya penerimaan PAD, sementara di sisi lain potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia cukup melimpah dan potensial untuk dikembangkan. Disamping Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan di tiap-tiap daerah, pemerintah pusat juga memberikan dana perimbangan sebagai pengalokasian kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dalam hal ini pendanaan yang bersifat prioritas nasional yang terdapat dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).

Undang-undang No.32 tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan.

Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan menjadi suatu kebutuhan. Kualitas manusia di suatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan di wilayahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali secara optimal sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga memungkinkan kemandirian keuangan daerahnya.

Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau salah satunya dari besar kecilnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan retribusi. Realita yang terjadi di provinsi-provinsi di Indonesia, pemerintah daerah masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat meskipun memiliki PAD yang cukup besar. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini sangat menentukan kemandirian keuangan daerah. Dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan dalam membiayai pembangunan di daerahnya sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Kemampuan keuangan dari suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, Pendapatan Asli Daerah selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin baik kemandirian keuangan wilayahnya.

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah 34 provinsi di Indonesia tahun 2014 s/d 2018 (dalam juta rupiah)

NO.	PROVINSI	PAD				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	ACEH	1,312,371	1,883,114	2,057,481	2,227,055	2,324,662
2	SUMATERA UTARA	4,944,502	5,257,668	4,630,468	4,925,627	5,732,425
3	SUMATERA BARAT	1,568,557	1,754,687	1,894,690	2,044,504	2,320,938
4	RIAU	2,840,011	3,656,361	3,495,548	3,735,800	3,638,995
5	JAMBI	973,070	1,218,125	1,273,892	1,393,072	1,494,530
6	SUMATERA SELATAN	2,482,129	2,784,967	2,733,329	3,016,085	3,607,819
7	BENGKULU	532,938	695,034	745,385	905,536	993,830
8	LAMPUNG	2,005,246	2,341,612	2,446,043	2,649,215	3,179,595
9	KEP. BANGKA BELITUNG	494,204	575,722	567,635	678,913	776,196
10	KEPULAUAN RIAU	875,913	1,127,745	1,109,056	1,104,344	1,223,732
11	DKI JAKARTA	39,559,415	33,686,176	39,322,613	41,488,193	44,570,508
12	JAWA BARAT	13,037,556	15,851,203	16,180,205	16,524,120	17,584,972
13	JAWA TENGAH	8,347,875	11,696,822	13,810,924	11,967,160	12,994,933
14	D I YOGYAKARTA	1,233,739	1,453,213	1,553,180	1,657,147	1,734,005
15	JAWA TIMUR	11,103,565	14,771,139	15,245,241	14,900,003	15,675,894
16	BANTEN	4,675,126	5,133,482	5,242,329	5,666,689	6,183,868
17	BALI	2,920,416	2,840,938	3,379,078	3,250,531	3,348,053
18	NUSA TENGGARA BARAT	1,144,588	1,256,937	1,384,517	1,501,611	1,719,188
19	NUSA TENGGARA TIMUR	695,416	829,811	966,858	1,004,044	1,061,828
20	KALIMANTAN BARAT	1,656,665	2,166,921	1,923,033	1,674,190	1,791,581
21	KALIMANTAN TENGAH	1,244,421	1,399,867	1,698,067	1,327,494	1,400,710
22	KALIMANTAN SELATAN	2,975,594	3,001,297	2,938,281	3,205,743	3,388,565
23	KALIMANTAN TIMUR	5,519,834	5,545,994	5,089,508	3,987,452	4,281,264
24	KALIMANTAN UTARA	11,833	349,247	320,047	419,868	476,423
25	SULAWESI UTARA	944,590	1,028,491	1,141,321	1,076,342	1,168,433
26	SULAWESI TENGAH	769,714	883,322	1,004,414	914,431	961,846
27	SULAWESI SELATAN	3,107,045	3,380,993	3,511,644	3,724,172	3,917,732
28	SULAWESI TENGGARA	529,176	533,102	558,392	743,891	620,402
29	GORONTALO	274,275	318,172	349,144	356,398	362,576
30	SULAWESI BARAT	215,353	239,796	277,686	299,021	334,264
31	MALUKU	439,589	603,458	527,230	519,252	807,617
32	MALUKU UTARA	204,901	248,646	282,996	486,709	263,431
33	PAPUA BARAT	203,783	289,969	316,276	403,269	423,919
34	PAPUA	762,151	876,587	1,097,662	1,308,280	1,008,758

Sumber : www.bps.go.id

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 34 provinsi di Indonesia masing-masing provinsi mengalami kenaikan PAD setiap tahunnya. PAD dinilai sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemandirian suatu daerah kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Delavallade (2006) menyatakan bahwa anggaran dalam bidang infrastruktur publik diharapkan mampu meningkatkan akses ke masyarakat dalam bidang kesejahteraan sehingga akan terjadi efisiensi dan pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan manusia. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007).

Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan wilayahnya, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Abdul Halim (2004) menjelaskan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, proses pengelolaan anggaran memiliki implikasi yang sangat luas terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah daerah, baik secara ekonomis maupun politis. Setiap daerah memiliki masalah proporsi kebijakan keuangan yang berbeda, dengan mempertimbangkan berbagai

faktor seperti kemampuan keuangan daerah, struktur sosial dan ekonomi penduduk, budaya, politis dan aturan yang berlaku dari pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Semakin besar nilai rasio kemandirian suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya sendiri. Dengan terciptanya kemandirian keuangan daerah maka pemerintah daerah akan mampu membiayai pembangunan daerahnya demi kesejahteraan masyarakat.

Selain variabel kemandirian keuangan daerah, laju pertumbuhan ekonomi juga menjadi variabel yang diteliti dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia menjadi salah satu target pemerintah daerah dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. UNDP (2011) mengungkapkan bahwa pembangunan manusia dapat berkesinambungan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Walaupun keduanya tidak memiliki hubungan secara otomatis, namun apabila kedua hal tersebut disatukan pada satu kebijakan pembangunan yang searah, maka akan tercipta suatu kekuatan yang dapat saling mendorong. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan sangat efektif untuk memperbaiki pembangunan manusia.

Salah satu indikator majunya sebuah daerah selain oleh infrastruktur yang memadai adalah kekuatan ekonomi wilayah tersebut. Ekonomi berpengaruh dalam keseharian

masyarakat. Ekonomi seringkali menjadi fokus utama bagi setiap negara dalam penataan pemerintahan. Sebab aspek ekonomi yang menjadi tolak ukur utama kesejahteraan

rakyat. Kesejahteraan rakyat ini menjadi salah satu tujuan utama dari pencapaian kepentingan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi menghasilkan pertumbuhan dalam produksi barang dan jasa dalam masyarakat yang dipandang akan terjadi dalam jangka panjang. Tumbuhnya perekonomian daerah dapat merangsang percepatan pembangunan. Sehingga pembangunan akan terjadi secara merata dan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur akan terwujud.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan jumlah produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek kesejahteraan wilayah semakin meningkat. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan.

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB Per Kapita. Mengingat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDRB, maka model ini akan memperhitungkan Pendapatan per kapita dalam menjelaskan perilaku IPM. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan

ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Hadi Sasana, 2001), sedangkan Pendapatan Per Kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi Pendapatan Per Kapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat di daerah tersebut (Thamrin, 2001). Hal ini berarti juga bahwa semakin tinggi PDRB Per Kapita akan semakin sejahtera penduduk di suatu wilayah.



Tabel 1.3**Pendapatan Per Kapita di 34 provinsi di Indonesia Tahun 2014-2018**

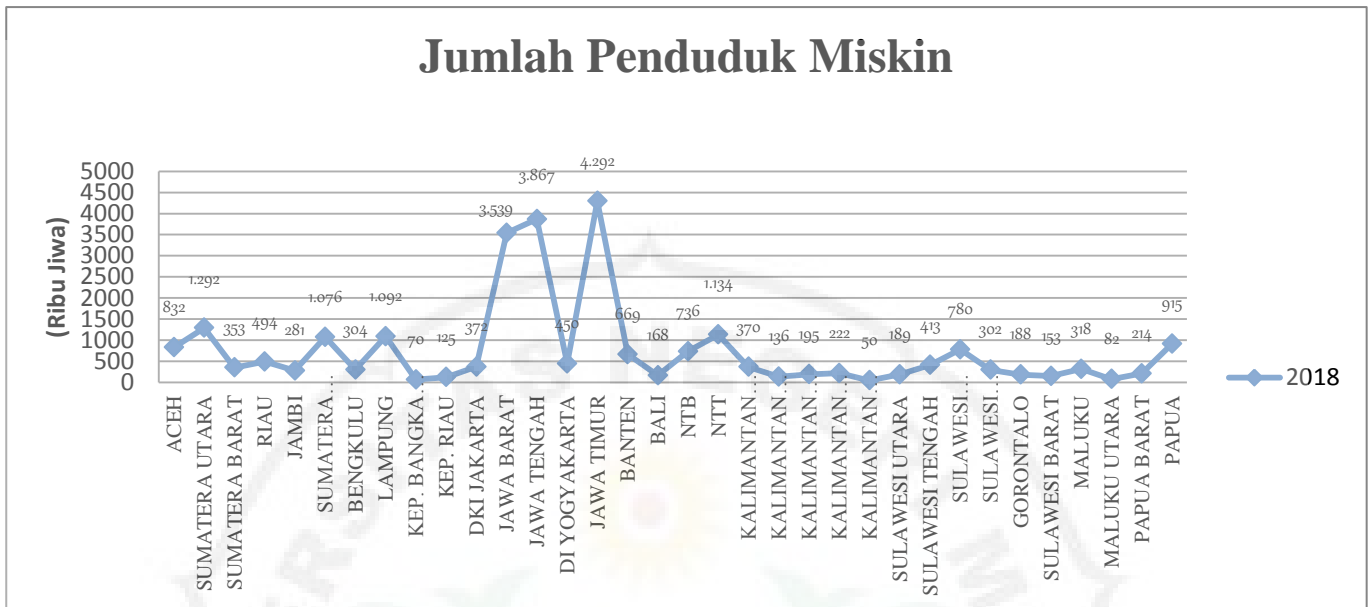
PROVINSI	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	23,129,040	22,524,310	22,835,290	23,362,900	24,013,810
SUMATERA UTARA	30,477,070	31,637,410	32,885,090	34,183,580	35,570,710
SUMATERA BARAT	25,982,830	27,080,760	28,164,930	29,312,170	30,477,760
RIAU	72,390,880	70,769,780	70,569,360	70,740,430	70,750,520
JAMBI	35,878,090	36,753,520	37,728,800	38,833,870	40,044,090
SUMATERA SELATAN	30,636,270	31,549,300	32,699,500	34,059,710	35,670,040
BENGKULU	19,626,720	20,302,480	21,039,840	21,751,640	22,498,430
LAMPUNG	23,647,270	24,581,780	25,568,570	26,614,880	27,741,250
BANGKA BELITUNG	32,859,640	33,480,380	34,132,870	34,933,520	35,767,100
KEP. RIAU	76,313,810	78,625,430	80,295,600	79,743,680	81,293,050
DKI JAKARTA	136,312,340	142,913,610	149,831,930	157,636,600	165,872,430
JAWA BARAT	24,966,860	25,845,500	26,923,510	27,970,920	29,161,390
JAWA TENGAH	22,819,160	23,887,060	24,959,490	26,088,910	27,287,370
DI YOGYAKARTA	21,867,900	22,688,360	23,565,680	24,533,800	25,776,380
JAWA TIMUR	32,703,390	34,271,810	35,970,780	37,724,290	39,588,240
BANTEN	29,846,640	30,813,030	31,781,560	32,947,600	34,202,020
BALI	29,668,900	31,093,610	32,689,090	34,129,840	35,905,000
NTB	15,369,940	18,475,140	19,305,790	19,091,260	18,028,940
NTT	10,742,320	11,087,910	11,468,790	11,863,410	12,276,770
KALIMANTAN BARAT	22,712,650	23,456,520	24,308,850	25,198,010	26,109,120
KALIMANTAN TENGAH	30,216,730	31,619,180	32,899,580	34,370,630	35,561,450
KALSEL	27,220,270	27,786,680	28,540,050	29,578,790	30,624,440
KALIMANTAN TIMUR	133,086,110	128,603,130	125,385,530	126,625,190	127,389,560
KALIMANTAN UTARA	77,152,600	76,823,460	76,635,460	78,918,570	80,732,380
SULAWESI UTARA	27,805,520	29,196,470	30,679,970	32,297,080	33,915,160
SULAWESI TENGAH	25,316,270	28,778,640	31,151,080	32,860,480	34,411,330
SULAWESI SELATAN	27,749,470	29,435,920	31,302,530	33,234,110	35,248,910
SULAWESI TENGGARA	27,896,050	29,202,700	30,476,390	31,894,420	33,285,690
GORONTALO	18,622,440	19,474,130	20,427,460	21,477,780	22,540,240
SULAWESI BARAT	19,232,050	20,250,510	21,067,910	22,001,010	22,951,020
MALUKU	14,219,620	14,740,380	15,321,180	15,942,450	16,612,470
MALUKU UTARA	16,869,520	17,533,780	18,177,300	19,192,970	20,322,460
PAPUA BARAT	59,142,590	60,064,130	61,242,010	62,169,960	64,498,120
PAPUA	39,271,880	41,376,970	44,342,140	45,577,050	48,093,020

Sumber : www.bps.go.id

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita di masing-masing provinsi berbeda dan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pendapatan perkapita dipengaruhi oleh PDRB dan jumlah penduduk, dengan kata lain pendapatan per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata yang diperoleh di suatu daerah, sehingga jika pendapatan tersebut besar masyarakat pun cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya (Kuncoro, 2004). Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun, yang ditunjukkan dengan PDRB, baik atas harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan.

Selanjutnya variabel yang diteliti adalah variabel kemiskinan yang dianggap mampu mempengaruhi naik turunnya indeks pembangunan manusia di 34 provinsi di Indonesia. Pengertian kemiskinan menurut World Bank adalah: "The denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other". Artinya bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

Seseorang atau keluarga dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan mereka atau akses mereka terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan kebanyakan orang dalam perekonomian. Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai tingkat absolut dari pendapatan atau standar hidup (Van den Berg, 2005).



Sumber : www.bps.go.id

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di 34 provinsi Tahun 2018

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat banyak. Terdapat lima provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia tahun 2018 yaitu provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur. Namun dapat dilihat juga setiap provinsi telah berusaha untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di daerahnya dari tahun ke tahun. Namun masih ada provinsi yang justru tambah tahun bertambah juga jumlah penduduk miskinnya. Seperti provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur yang bisa disebabkan oleh banyaknya daerah tertinggal di provinsi tersebut yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Miskin di 34 provinsi di Indonesia Tahun 2014-2018

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	837	859	841	830	832
SUMATERA UTARA	1,361	1,508	1,453	1,327	1,292
SUMATERA BARAT	355	350	377	360	353
RIAU	498	563	502	496	494
JAMBI	282	312	291	279	281
SUMATERA SELATAN	1,086	1,113	1,097	1,087	1,076
BENGKULU	317	323	326	303	304
LAMPUNG	1,144	1,101	1,140	1,084	1,092
KEP. BANGKA BELITUNG	67	67	71	76	70
KEP. RIAU	124	115	119	128	125
DKI JAKARTA	413	369	386	393	372
JAWA BARAT	4,239	4,486	4,168	3,774	3,539
JAWA TENGAH	4,562	4,506	4,494	4,197	3,867
DI YOGYAKARTA	533	486	489	466	450
JAWA TIMUR	4,748	4,776	4,639	4,405	4,292
BANTEN	649	691	658	700	669
BALI	196	219	175	176	168
NUSA TENGGARA BARAT	817	802	787	748	736
NUSA TENGGARA TIMUR	992	1,161	1,150	1,135	1,134
KALIMANTAN BARAT	382	406	390	389	370
KALIMANTAN TENGAH	149	148	137	138	136
KALIMANTAN SELATAN	190	189	184	195	195
KALIMANTAN TIMUR	253	210	211	219	222
KALIMANTAN UTARA	-	41	47	49	50
SULAWESI UTARA	198	217	200	195	189
SULAWESI TENGAH	387	406	413	423	413
SULAWESI SELATAN	806	865	797	826	780
SULAWESI TENGGARA	314	345	327	313	302
GORONTALO	195	207	204	201	188
SULAWESI BARAT	155	153	147	149	153
MALUKU	307	328	332	320	318
MALUKU UTARA	85	73	76	78	82
PAPUA BARAT	225	226	224	213	214
PAPUA	864	898	915	910	915

Mengacu pada peraturan pemerintah dalam Undang-Undang otonomi daerah mengenai asas desentralisasi sebagai bentuk partisipasi pemerintah dalam pembangunan serta komponen pendapatan perkapita yang tiap tahun cenderung mengalami peningkatan di tiap provinsi sebagai gambaran kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dan usaha pemerintah dalam mengurangi kemiskinan untuk mendorong perluasan perekonomian yang sehat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam proses pembangunan khususnya di negara berkembang Indonesia, maka penulis terdorong untuk mengetahui lebih lanjut melalui penulisan ilmiah ini dengan judul “Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 34 Provinsi di Indonesia”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 34 provinsi di Indonesia.
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 34 provinsi di Indonesia.
3. Bagaimana Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 34 provinsi di Indonesia.
4. Bagaimana Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara simultan di 34 provinsi di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan masalah yang dikemukakan di atas. Adapun tujuannya adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia
4. Untuk menganalisis pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Per Kapita dan Jumlah Penduduk Miskin secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memperkuat penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan analisis pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Per Kapita dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 34 Provinsi di Indonesia.
2. Bagi pemerintah di 34 Provinsi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan pertimbangan dalam mengambil keputusan sebagai strategi menaikkan angka Indeks Pembangunan Manusia di 34 Provinsi di Indonesia.